

PRESS RELEASE

BPK PERWAKILAN PROVINSI KALBAR



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALBAR TAHUN ANGGARAN 2016

Pontianak, Senin (12 Juni 2017) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016, dengan memperhatikan kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada hari ini, Senin 12 Juni 2017 telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, yang diserahkan oleh Auditor Utama Keuangan Negera VII **Dr. Abdul Latief, S.E., M.M.** di dampingi oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat **Dra. Ida Sundari, M.M.** dalam Sidang Paripurna Istimewa bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 yang serahkan kepada DPRD dan kepada Gubernur Kalimantan Barat. LHP atas LKPD Tahun 2016 terdiri dari tiga laporan utama yaitu LHP atas LKPD Tahun 2016, LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual dan merupakan Tahun kedua Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Jumlah laporan keuangan terdiri dari 7 laporan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016 telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Untuk itu, BPK RI memberikan opini "**Wajar Tanpa Pengecualian**" atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016.

Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Kalbar

11. Ahmad Yani, Pontianak, Telp. (0561) 585240 ext. 205

Pencapaian opini WTP ini adalah yang kelima kalinya bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta jajaran SKPD-nya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya.

Namun demikian, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, diantaranya:

1. Pengelolaan Persediaan pada UPT Museum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Belum Memadai; dan
2. Pengelolaan Aset Tetap Provinsi Kalimantan Barat Kurang Memadai;

Sebagai bentuk apresiasi BPK memberikan Piagam Penghargaan WTP yang ditandatangani oleh Anggota VI BPK RI Dr. Harry Azhar Azis, MA kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

BPK berharap pada tahun 2017 ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat mempertahankan dan meningkatkan beberapa indikator kesejahteraan di Provinsi Kalimantan Barat seperti ratio IPM pada level yang lebih tinggi dari rata-rata nasional serta mampu meningkatkan lagi angka pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi nasional, menurunkan tingkat kemiskinan, dan menurunkan tingkat pengangguran dibawah angka nasional. Karena pencapaian Opini "Wajar Tanpa Pengecualian" akan sia-sia jika kesejahteraan rakyat di Provinsi Kalimantan Barat belum tercapai.

Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Kalbar

Jl. Ahmad Yani, Pontianak Telp. (0561) 585349 ext. 205

Website: pontianak.bpk.go.id, Email: bpkpontianak@gmail.com